



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KENDALA HILIRISASI BATUBARA

**Niken Paramita Purwanto**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[niken.paramita@dpr.go.id](mailto:niken.paramita@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Hilirisasi mineral nikel dianggap cukup sukses, berbeda halnya dengan hilirisasi batubara yang sampai saat ini masih terkendala. Kementerian ESDM menyatakan bahwa sejumlah proyek untuk meningkatkan nilai tambah batubara menghadapi tantangan besar yang membuat perkembangannya belum signifikan. Staf Khusus Menteri ESDM bidang Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif, mengungkapkan bahwa sejumlah proyek hilirisasi batubara terkendala pembiayaan dan nilai keekonomian proyek yang menyebabkan proses studi kelayakan atau *feasibility study* belum juga selesai. Padahal, pelaku usaha atau perusahaan harus mematuhi rencana proyek hilirisasi batubara yang telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Jika ada perpanjangan waktu dalam proyek hilirisasi batubara dari rencana semula maka perusahaan harus mengajukan permohonan kembali kepada Kementerian ESDM. Bagi perusahaan yang memiliki Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hilirisasi menjadi kewajiban yang tak bisa diabaikan.

Saat ini, sejumlah perusahaan batubara seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) masih terus melakukan eksplorasi atas produk turunan batubara. Produk turunan batubara tidak hanya terbatas pada *dymethyl ether* (DME), tetapi juga mencakup *mono ethylene glycol* (MEG), anoda, hingga grafit. PTBA melakukan pengkajian terhadap semua potensi hilirisasi yang ada dan yang paling memungkinkan untuk dapat segera direalisasikan. Sebelumnya, proyek gasifikasi batubara menjadi DME gagal terealisasi karena mitra dari Amerika Serikat, yaitu Air Products, memilih mundur dari proyek tersebut. Sementara, untuk mencari mitra pengganti tidaklah mudah karena proyek hilirisasi batubara butuh biaya besar sehingga perlu pengkajian yang mendalam terutama dari aspek keekonomiannya. Pemerintah pun masih terus berupaya mendapatkan investor baru dalam proyek hilirisasi batubara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa pemerintah sedang aktif mencari investor asing yang memiliki teknologi hilirisasi batubara yang memadai untuk mengembangkan program hilirisasi batubara dalam rangka meningkatkan nilai tambah batubara di dalam negeri, salah satunya berasal dari Tiongkok.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan beberapa insentif untuk perusahaan yang berkomitmen melakukan hilirisasi batubara, yaitu pengurangan tarif royalti batubara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%, pengaturan harga batubara khusus untuk meningkatkan nilai tambah (gasifikasi) di mulut tambang, dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara khusus pada batubara untuk gasifikasi diberikan sesuai umur ekonomis industri gasifikasi batubara. Namun, insentif-insentif tersebut dinilai belum cukup untuk dapat mendorong hilirisasi batubara di tanah air. Para pelaku usaha batubara menyatakan bahwa pelaksanaan hilirisasi batubara masih memerlukan sejumlah dukungan baik penguatan regulasi maupun insentif fiskal dan nonfiskal, agar proyek hilirisasi batubara dapat menarik secara bisnis. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan pemberian bentuk dukungan lainnya, seperti insentif pajak, keringanan bea impor bahan baku dan suku cadang, kemudahan akses pendanaan ke perbankan, kepastian *oftaker* (pembeli), dan lainnya.

## Atensi DPR

Hilirisasi batubara di tanah air menghadapi tantangan besar yang membuat perkembangannya terhambat. Proyek-proyek hilirisasi batubara terkendala pembiayaan dan nilai keekonomian proyek yang menyebabkan proses *feasibility study* belum juga selesai. Proyek hilirisasi batubara merupakan proyek berbiaya tinggi sehingga perlu pengkajian yang mendalam terutama dari aspek keekonomiannya. Dukungan insentif yang telah diberikan pemerintah masih belum mampu membuat proyek hilirisasi batubara menarik secara bisnis. Menyikapi hal ini, Komisi VII DPR RI yang membidangi energi perlu meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas permasalahan-permasalahan yang menghambat perkembangan hilirisasi batubara untuk dapat dicarikan solusinya. Komisi VII DPR RI juga perlu meminta pemerintah untuk dapat memberikan bentuk dukungan lainnya yang dimungkinkan demi mendorong perkembangan hilirisasi batubara di tanah air.

### Sumber

cnbcindonesia.com, 29 November 2023;  
*Kontan*, 29 November 2023; dan  
kontan.co.id, 28 dan 29 November 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

### EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023